



PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALITBANG KEMENDIKBUD

2017
Policy Brief



PENDIDIKAN KEBHINEKAAN DI SATUAN PENDIDIKAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki karakteristik penduduk sangat beragam ditinjau dari suku, ras, agama, budaya, dan bahasa. Keragaman dan perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi harus dikelola supaya bisa hidup rukun berdampingan dalam sebuah harmoni dan kedamaian bersama. Keragaman merupakan modal sosial dan potensi dalam membangun bangsa, namun jika tidak bisa dikelola dengan baik, maka potensi tersebut akan berubah menjadi ancaman bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sampai saat ini kita masih menyaksikan beberapa sikap, tindakan, dan perilaku masyarakat yang berpotensi mengancam keutuhan NKRI, yakni: tindakan radikal, kekerasan, dan intoleran yang menyebabkan terjadinya konflik sosial, dominasi atau

diskriminasi mayoritas terhadap minoritas bahkan pemaksaan sehingga hak-hak mereka terpinggirkan, dan kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai kebhinekaan/multikultural dalam kehidupan masyarakat yang sangat plural.

Makna Kebhinekaan

Kebhinekaan diberi pengertian/makna dengan mengadaptasi konsep multikulturalisme, yaitu adanya kesediaan untuk menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa mempedulikan perbedaan budaya, etnik, jender, bahasa, ataupun agama. Kebhinekaan dibatasi pada ruang lingkup keberagaman yang bersifat kodrati terutama etnis, agama, dan budaya. Satuan pendidikan dalam lingkup pendidikan menengah.

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang, Kemendikbud telah melakukan penelitian kebijakan terkait pendidikan kebhinekaan/multikultural untuk membangun sebuah pemahaman dan sikap toleransi dan menghargai terhadap perbedaan, mendorong sikap adil dan tidak diskriminatif terhadap kelompok lain, dan kemauan untuk bekerjasama di antara kelompok masyarakat dalam mewujudkan harmoni sosial. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ini dilakukan observasi secara mendalam pada dua lokasi yang memiliki kondisi penduduk sangat plural namun dikenal memiliki tingkat toleransi yang tinggi, yakni Kota Singkawang, dan Kota Salatiga.

Praktik-praktik baik penerapan pendidikan kebhinekaan di sekolah

Hasil observasi mendalam pada dua lokasi tersebut menggambarkan bahwa pada hakikatnya pembelajaran kebhinekaan identik dengan pembelajaran multikulturalisme yaitu kebijakan dalam praktik pendidikan dalam mengakui, menerima dan menegaskan perbedaan dan persamaan manusia baik

secara gender, ras, suku, etnis, kelas/golongan sosial.

Implementasi model pembelajaran kebhinekaan di sekolah ditunjukkan dengan suasana kelas yang dikembangkan mencerminkan: 1) keanggotaan kelompok belajar siswa lintas sektoral/kultur; 2) proses belajar memberikan kesempatan kepada siswa dari berbagai ras, suku, etnis untuk berinteraksi dengan mengurangi rasa ketakutan; 3) semua aturan kelas diputuskan secara bersama dan berlaku untuk semua.

Seain itu, Implementasi model pembelajaran kebhinekaan di sekolah ditunjukkan pula oleh peran guru dalam pembelajaran kebhinekaan, antara lain: 1) mendorong siswa belajar tentang hal-hal yang terkait *stereotype* dan hubungan lainnya yang dianggap bias serta dampak negatif yang dihasilkannya; 2) mendorong siswa belajar berbagi nilai kebajikan dalam internal kelompok maupun antar-kelompok seperti nilai kebajikan, keadilan, kebebasan, perdamaian, kepedulian sosial dll.; 3) guru membantu siswa dalam berinteraksi secara efektif dengan siswa lain dari berbagai ras, suku, etnis dan agama; 4) guru menggunakan teknik dan pendekatan budaya yang beragam dalam menilai pengetahuan siswa dan keterampilan sosialnya. Hal yang cukup dan harus mendapat perhatian dalam implementasi model pembelajaran kebhinekaan di sekolah adalah adanya pembelajaran transformasi informasi dengan menggunakan anggota masyarakat dan orang tua sebagai sumber belajar.

Sekolah bercirikan agama (SMA Kristen) menerima siswa dari agama lain, serta menyediakan ruang ibadah (Musholla) bagi umat muslim; pada hari jum'at jam belajar menyesuaikan (berakhir) sebelum waktu sholat Jum'at; memfasilitasi kegiatan keagamaan dari beragam agama, aktualisasi beragam budaya; sekolah tidak menunjukkan simbol-simbol keagamaan namun lebih dominan simbol-simbol kebangsaan (pahlawan, pulau-pulau, budaya daerah, dsb); Di sekolah lain (SMA/SMK negeri)

menyediakan guru agama yang sesuai dengan agama muridnya, walaupun hanya satu murid yang dilayani, serta menyediakan ruang khusus untuk belajar agama; Siswa yang memimpin doa dilakukan secara bergantian, tidak harus siswa muslim tapi bisa dilakukan secara bergantian; Di pojok pojok kelas ada pajangan pajangan, tulisan atau mading kebhinekaan; Setiap peringatan hari besar keagamaan, melibatkan seluruh siswa secara lintas agama, bukan kegiatan ritualnya, tapi dalam kegiatan kepanitiaannya; Aktualisasi keragaman budaya ditunjukkan pada perayaan hari Kartini.

Hambatan penerapan pendidikan kebhinekaan di sekolah.

- a) Di sekolah swasta, masih ada masalah terkait penyediaan guru agama yang tidak bisa dipenuhi oleh sekolah. Di sekolah muslim hampir jarang ada siswa non muslim, sebaliknya di sekolah kristen, ada banyak siswa muslim yang sekolah disitu, dan sekolah kristen tidak menyediakan guru agama islam untuk siswa Islam;
- b) Materi kurikulum pengajaran agama lebih fokus kepada hubungan manusia dengan tuhan, tapi hubungan manusia dengan manusia masih kurang;
- c) Tuntutan kurikulum yang sangat padat, apalagi menjelang pelaksanaan UN, menyebabkan pengembangan pendidikan kebhinekaan menjadi kurang mendapat perhatian;
- d) Tidak semua Pemda memahami regulasi kebijakan dari Pusat, terkadang perangkat kebijakan dari Pusat belum lengkap, di tingkat Pemda sudah harus jalan, sehingga timbul ketidaksesuaian antara Pusat dan Daerah;

Rekomendasi yang diusulkan

1. **Pembelajaran berbasis kebhinekaan/multikultural yang terintegrasi dengan semua mata pelajaran** diperlukan dalam rangka menumbuhkan kesadaran kolektif (*collective awareness*) terhadap persamaan hak dan kewajiban; kebersamaan dan keterikatan (*sense of solidarity*); serta rasa memiliki (*sense of belonging*) yang mendorong siswa untuk menerima kemajemukan; dan menunjukkan perilaku penerimaan yang tingginya terhadap kebhinekaan.
2. **Penyajian pokok-pokok bahasan bernilai budaya** hendaknya bersifat kontekstual dan *authentic*; menyajikan fakta dan data yang menggambarkan kontribusi etnik, agama, dan budaya; dan, menekankan perlunya memelihara kebhinekaan sebagai modal dasar pembangunan.
3. **Forum guru diharapkan dapat menjalankan fungsinya** sebagai pengembang kurikulum (*curriculum developer*) kreatif dan inovatif dalam pembelajaran berbasis multikultural berbasis keteladanan sikap dan perilaku saling menghargai dan menghormati keanekaragaman budaya yang berbeda, namun dapat hidup berdampingan secara damai.
4. **Kepala sekolah harus mendorong pengembangan pendidikan nilai-nilai multikultural seluas-luasnya**; memberikan kesempatan kepada siswa dan guru untuk melaksanakan kegiatan yang bernuansa etnik, agama, dan budaya di sekolah secara period.

5. **Pemerintah daerah direkomendasikan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kebhinekaan;** membuat kebijakan yang proporsional yang memenuhi rasa keadilan; memelihara kerukunan antar etnik, agama, dan budaya; dan, mengatisipasi setiap potensi perpecahan di masyarakat.
6. Para siswa dari semua etnik dan suku bangsa hendaknya dibekali semangat bela negara yang dapat menumbuhkan nasionalisme melalui berbagai kegiatan ekstra kurikuler (latihan kepemimpinan, pramuka, dan sebagainya).

Policy Brief ini merupakan hasil dari penelitian/ kajian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi :

**Pusat Penelitian Kebijakan
Pendidikan dan Kebudayaan**

**Komplek Perkantoran Kemendikbud, Gedung E lantai 19,
Jalan Jendral Sudirman, Jakarta**